

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR:
02/PDT.G/2010/PN.DPK TENTANG GUGATAN PERDATA
TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MENINGGAL DUNIA UNTUK MENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

PENULISAN HUKUM

Oleh :
ANTONI
201310110311011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR:
02/PDT.G/2010/PN.DPK TENTANG GUGATAN PERDATA TERHADAP
AHLI WARIS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENINGGAL DUNIA UNTUK MENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA**

Diajukan Oleh:

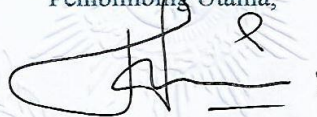
ANTONI

201310110311011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 23 Januari 2020

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,

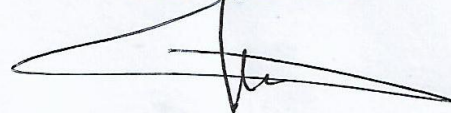


Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANTONI

201310110311011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 23 Januari 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

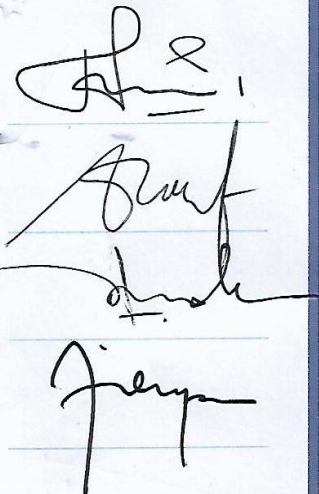
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.

Penguji II : Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANTONI
NIM : 201310110311011
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR:
02/PDT.G/2010/PN.DPK TENTANG GUGATAN PERDATA TERHADAP
AHLI WARIS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENINGGAL DUNIA UNTUK MENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jalang, 19 Februari 2020


Antoni



ABSTRAK

Nama : Antoni
Nim : 201310110311011
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. Tentang Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara

Pembimbing : Dr. Herwastoeti, SH, M.Si
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius karena dampaknya mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang akan mengurangi kemampuan Negara dalam memenuhi hak-hak rakyatnya, oleh sebab itu penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan instrumen hukum pidana kepada pelaku korupsi, tetapi juga menggunakan instrumen hukum perdata terhadap ahli warisnya untuk mengganti kerugian keuangan Negara, seperti dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/ PN.DPK. yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. tentang gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia untuk mengganti kerugian keuangan negara. 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian keuangan negara berdasarkan hukum waris dalam sistem hukum perdata? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian Yuridis Normatif, berdasarkan hasil penelitian kasus yang penulis teliti ini sudah memenuhi karakteristik dapat digunakannya gugatan perdata, karena adanya unsur “Kerugian Keuangan Negara” yang nyata dan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi dilakukan untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan Negara, karena meninggalnya terdakwa tindak pidana korupsi, di sisi lain ditemukan adanya “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh alm. Yusuf Setiawan secara perdata yang nyata menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga diajukannya gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa (alm. Yusuf Setiawan) untuk mengganti kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dalam hal terjadinya pewarisan ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan (aktiva), tetapi juga bertanggungjawab melunasi utang (pasiva) pewaris dalam hal ini kerugian keuangan Negara, dan ahli waris bebas menentukan sikap terhadap harta warisan yaitu, menerima warisan secara penuh, menolak warisan atau menerima dengan syarat.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Ahli Waris

ABSTRACT

Name : Antoni
NIM : 201310110311011
Title : Analysis of Depok District Court Decision Number: 02 / PDT.G / 2010 / PN.DPK. Regarding Civil Lawsuit Against Accused Heirs of Corruption Crimes Who Died to Replace State Financial Losses.
Supervisors : Dr. Herwastoeti, SH, M.Sc
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Criminal corruption acts in Indonesia is still a serious problem because its impact resulted in state financial losses that will reduce ability state to fulfil the rights of people. Therefore, law enforcement of criminal corruption acts not only uses criminal legal instruments to perpetrators of corruption but also civil legal instruments used by his heirs to compensate the state financial losses. As a case in Pengadilan Negeri Depok on decision number: 02/PDT.G/2010/ PN.DPK which each problem on this skripsi are 1. How is the analysis of Decision Number: 02 / PDT.G / 2010 / PN.DPK. related to a civil lawsuit against the heirs of the defendant in a criminal act of corruption who died to compensate for the State financial losses? 2. What is the civil liability form of the heirs of the defendant in the corruption case who died to compensate the State financial losses based on inheritance law in the civil law system? To answer these two problems, a Normative Juridical research method is used. Based on the result of case studies that the author have met suitability of the characteristics of civil law. It is viewed as an element of "State Financial Losses" real and after a criminal act is no longer possible to try to recover the financial losses of State because the death who accused to corruption. On the other hand, there was found the "Unlawful Act" latest conducted by Yusuf Setiawan who did compensate to the State financial losses. So, the civil suit filed with the defendant's heir (the late Yusuf Setiawan) to compensate the state's financial losses on Article 34 of Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 Concerning the Eradication of Corruption Acts stipulates that the State Attorney has the authority to make a civil suit for State's losses caused by unlawful acts of the Defendant who has died or at least to his heirs. In the case of inheritance, the heirs did not get the right to wealth but also the obligation to debts and other burdens caused by the actions of the testator, including losses resulting from unlawful acts.

Keywords: State Financial Losses, Corruption Act, Heirs

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Tentang Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat selesai, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai Ayahku M. Abdul Qodir Jailani dan Ibuku Faujiah serta Kakak ku Faujiani dan Sri Astuti, tidak lupa juga Nenek saya Sri Faunah, mereka semua senantiasa memberikan doa, dukungannya selama ini, dan selalu memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi.
3. Saudaraku seperjuangan M. Zaki Mubarak yang selalu hadir ketika penulis patah semangat dan selalu mendorong agar segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Herwastoeti, SH, M.Si selaku pembimbing pertama yang banyak memberikan semangat serta arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapa Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku pembimbing kedua yang banyak memberikan arahan dan bimbingan yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh Staf TU dan Staf karyawan yang telah melayani penulis serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabatku di Asrama Kayuh Baimbai Kota Banjarmasin yang selalu memberikan suport kepada penulis.
9. Semua kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi teman kolektif selama penulis berproses di FH UMM.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna sebab terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sebab itu penulis memohon saran dan masukan yang bersifat membangun, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

DAFTAR ISI

Lembar Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Korupsi	17
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi	17
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	24
4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi	26
B. Tinjauan Tentang Keuangan Negara	29
1. Pengertian Keuangan Negara	29
2. Kerugian Keuangan Negara	31
3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	32

C. Tinjauan Tentang Gugatan Perdata Mengganti Kerugian Keuangan Negara Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi	35
1. Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata	35
2. Pengertian Gugatan Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata	40
3. Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara	41
D. Tinjauan Tentang Hukum Waris Perdata	43
1. Pengertian Umum Dalam Hukum Waris Perdata	43
2. Syarat Dan Prinsip Umum Pewarisan	46
3. Cara Mendapatkan Warisan	49
4. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan	50
5. Hak Ahli Waris	52
6. Kewajiban Ahli Waris	56
BAB III: ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Analisis Putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/N.DPK Tentang Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara	61
1. Kasus Posisi	61
2. Para Pihak	66
3. Amar Putusan	67
4. Analisis	68
B. Bentuk Pertanggungjawaban Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata	100
1. Kasus Posisi	100
2. Analisis	102
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	115
1. Kesimpulan	115
2. Saran	117
Daftar Pustaka	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Seminar

Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta Seminar

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm. 16.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013 . hlm. 17.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan 2007, hlm 2.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.133.
- Putu Ariesta Wiryawan, *Analisis Hukum Penyebab Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, kertha wicara, vol.05, No. 02, Fbruari 2016.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.60.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 2.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.77.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia, 2013, hlm.13.
- Martiman Prodjohanmidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm.15.
- Buku Saku Korupsi, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006.
- W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 1.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. hlm. 20

- Yunus Husein, *Kerugian Negara dalam Tipikor*, Seputar Indonesia 28 Mei 2008, hal. 7.
- Nyoman Serikat PJ, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 6.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014, hlm .19.
- Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 11.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 306.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 15
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.
- Setiawan, *Kriteria Perbuatan Melawan Hukum* , Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.10.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 19
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 hlm.21.
- J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung : Alumni, 1999 Hlm.177.
- Munir, Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.47.

- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 90.
- G.Karta Saputra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 54.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997, hlm. 97.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 249.
- R.Subekti, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, hlm. 97.
- Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006, hlm. 4.
- J. Satrio, *Hukum Waris, cet. 2*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 20.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris (Suatu Pembahasan Teori Dan Praktek)*, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 37.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 49.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 85
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid 2*, Jakarta: Intermasa, 1971, hlm.28.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 141.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989 hlm. 22.
- Ibid., hlm. 28.
- A Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, jilid 2*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief , Jakarta: PT Intermasa, 1991, hlm 1.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, cet. ke-1*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 47.

- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang, cet. ke-2*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 11.
- J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 199.
- Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat*, Bandung, Gramedia 2011, hlm. 254.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 75.
- D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, halaman 58.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2008, hlm 27.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 11.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 15.
- Komariah, SH., M.Si., M.Hum, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press 2016, hlm.16-17.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung, 1967, hlm8
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003), hlm. 53-54.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer, Cetakan kedua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005), hlm.12-13.
- Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1999, hlm. 65.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 458
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 267.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003, hlm. 36

Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 15.

R. Soerojo Wongsowidjojo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik. Simposium Hukum Waris Nasional*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, hal. 172.

R.Subekti, "Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris," (Kertas Kerja disampaikan pada Simposium Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, hal. 97).

Prof. Subekti, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31 Jakarta Intermasa, 2003. hlm.96.

Ibid., hlm. 99.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pasal 32 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pasal 33 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pasal 34 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* pada Pasal 30 ayat 2.

Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.

Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Antoni

Nim : 201310110311011

Dengan Judul Skripsi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Delok Nomor:

02/PDT.G/2010/Pm.Dpk. Tentang Gugatan Perdata Terhadap Ahli

Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia

Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 februari 2020

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

